BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berakhirnya Perang Dunia II yang dianggap sebagai peristiwa yang paling kejam dalam sejarah umat manusia menimbulkan dampak yang begitu buruk bagi dunia internasional. Berbagai pelanggaran hukum perang maupun pelanggaran terhadap kemanusiaan yang terjadi selama Perang Dunia II menimbulkan kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya pengaturan mengenai perlindungan terhadap hak asasi yang dimiliki manusia. Kesadaran masyarakat tersebut menemukan titik terang setelah Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor A/RES/3/217 yang menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia.¹

Setiap negara yang berdaulat berkewajiban untuk menjamin perlindungan atas hak dasar dan kebebasan yang dimiliki oleh warga negaranya. Patrick Macklem menyatakan bahwa Hukum HAM Internasional mengacu pada misi menyeluruh untuk melindungi fitur universal manusia dari pelaksanaan kekuasaan berdaulat, lebih jauh dia menyatakan bahwa hak asasi manusia memiliki kepentingan hukum

¹ Universal Declaration of Human Rights 1948.

internasional karena HAM tersebut memantau keadilan distributif atas struktur dan operasi tatanan hukum internasional itu sendiri.²

Salah satu bagian penting dari HAM yaitu larangan terhadap segala bentuk tindakan penyiksaan. Pasal 5 DUHAM yang menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina”, menjamin sepenuhnya hak setiap orang untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Selain itu, pada Pasal 7 Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik dengan jelas mengatur jaminan setiap orang untuk bebas dari segala bentuk praktik dan kejahatan penyiksaan termasuk jaminan untuk tidak dijadikan obyek eksperimen medis tanpa persetujuan dirinya. Pasal ini yang kemudian dikembangkan dan melahirkan Konvensi khusus yang mengatur larangan tindak penyiksaan yaitu *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of 1984* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia). Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dalam Resolusinya No. 39/46 tanggal 10 Desember dan mulai diberlakukan tanggal 26 Juni 1987.³

Dalam Konvensi Menentang Penyiksaan diatur mengenai tanggung jawab Negara Pihak untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum atau

² Azizur Rahman Chowdhury dan Md. Jahid Hossain Bhuiyan, 2010, *An Introduction to International Human Rights Law*, Leiden, Koninklijke Brill NV, hlm. 1.

³ Agung Yudha Wiranata, 2005, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X, Materi: Konvensi Anti Penyiksaan*, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), hlm. 1.

langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindakan penyiksaan di dalam wilayah kekuasaannya.⁴ Konvensi ini juga mewajibkan Negara Pihak untuk menjamin bahwa tindakan penyiksaan maupun percobaan untuk melakukan penyiksaan dikategorikan sebagai pelanggaran menurut aturan hukum pidana di negaranya. Larangan tindakan penyiksaan yang diatur dalam instrumen hukum internasional ini bersifat mengikat terhadap Negara Pihak dan berlaku dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan perang maupun pada saat damai.⁵ Untuk mendukung pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Konvensi ini, dibentuk suatu badan pemantau berdasarkan Pasal 17 Konvensi ini yang dinamakan Komite Menentang Penyiksaan (*The Committee against Torture*).

Perlu diketahui juga bahwa larangan tindakan penyiksaan sebagai bagian dari hak asasi manusia juga merupakan bagian dari *jus cogens* atau *peremptory norm* (hukum memaksa).⁶ *Jus cogens* atau *peremptory norm* memegang kedudukan hirarki tertinggi diantara norma-norma dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum internasional, oleh karenanya setiap perjanjian internasional menjadi batal apabila bertentangan dengan *jus cogens* atau yang disebut juga sebagai *peremptory norms*

⁴ Article 2, Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

⁵ United Nations, "Torture, Instrument of Terror, Can Never be Used to Fight Terror, Secretary-General Says In Message for Human Rights Day", diakses pada <http://www.un.org/press/en/2005/sgsm10257.doc.htm>, tanggal 24 Oktober 2017 pukul 21.48 WIB.

⁶ *Jus Cogens* atau *Peremptory Norm* berasal dari bahasa latin yang artinya hukum yang memaksa. *Jus Cogens* atau *Peremptory Norm* memiliki kedudukan hirarki tertinggi diantara semua norma dan prinsip-prinsip lainnya. Oleh karenanya, *Jus Cogens* atau *Peremptory Norm* harus dipatuhi dan pelaksanaannya tidak dapat dikurangi karena memiliki sifat "*non-derogable*". (Lihat: M. Cherif Bassiouni, 1996, "*International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes*", Duke Law Journal: Law and Contemporary Problems, Vol. 59, No. 4, hlm. 67).

sebagaimana diatur oleh Artikel 53 *Vienna Convention on the Law of Treaties*.⁷ Kejahatan internasional yang merupakan pelanggaran terhadap *jus cogens* diantaranya yaitu agresi; genosida; kejahatan terhadap kemanusiaan; kejahatan perang; pembajakan; perbudakan dan segala hal yang berhubungan dengan perbudakan dan penyiksaan.⁸ Selain itu, Bassiouni menjelaskan ciri-ciri penting suatu kejahatan dapat dikatakan melanggar *jus cogens* apabila kejahatan tersebut memiliki sifat berupa ancaman terhadap kedamaian dan keamanan umat manusia dan perilaku yang mengejutkan atau bertentangan dengan hati nurani manusia (*conduct or consequences which are shocking to the conscience of humanity*).

Tindakan penyiksaan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), secara komprehensif diatur oleh *The Rome Statute of The International Criminal Court 1998* yang hingga saat ini menjadi persoalan bersama masyarakat internasional. Maka dari itu terhadap larangan tindak penyiksaan tidak dikenal adanya pengecualian. Berdasarkan hukum kebiasaan internasional serta menurut perjanjian hak asasi manusia internasional, tindak penyiksaan atau perlakuan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dilarang setiap waktu dan dalam keadaan apapun.⁹ Larangan tindak penyiksaan merupakan bagian dari HAM yang tidak dapat dikurangi dan ditangguhkan bahkan pada saat

⁷ Article 53, Vienna Convention on the Law of Treaties: "A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international law. For the purposes of the present Convention, a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character."

⁸ M. Cherif Bassiouni, *Op. Cit.*, hlm. 68.

⁹ Human Rights Watch, "The Legal Prohibition Against Torture", diakses pada <https://www.hrw.org/news/2003/03/11/legal-prohibition-against-torture>, tanggal 24 Oktober 2017 pukul 22.21 WIB.

negara dalam keadaan berperang, dalam kondisi keamanan nasional terancam, atau dalam keadaan darurat lainnya. Larangan ini begitu kuat dan diterima secara universal oleh masyarakat internasional sebagai prinsip dasar hukum kebiasaan internasional.¹⁰ Artinya adalah, terhadap negara-negara yang belum meratifikasi salah satu perjanjian internasional yang secara eksplisit melarang tindakan penyiksaan, negara-negara tersebut tetap dilarang menggunakan tindakan penyiksaan terhadap siapapun dan dalam keadaan apapun.

Indonesia merupakan salah satu Negara Pihak yang ikut menandatangani Konvensi ini pada tanggal 23 Oktober 1985.¹¹ Sebagai salah satu Negara pihak yang ikut menandatangani Konvensi tersebut, Indonesia kemudian meratifikasi Konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) dan karenanya Indonesia menjadi Negara Pihak dalam Konvensi ini.

Sebagai Negara Pihak dalam Konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum dan langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah terjadinya praktik penyiksaan dalam wilayah kekuasaan Indonesia. Selain itu, sesuai mandat Pasal 4 Negara Pihak dalam Konvensi ini diharuskan untuk menjamin bahwa tindak penyiksaan adalah pelanggaran menurut

¹⁰ The Association for the Prevention of Torture and The Center for Justice and International Law, 2008, *Torture in International Law, a Guide to Jurisprudence*, Geneva, SRO-Kundig, hlm. 2.

¹¹ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

ketentuan pidananya, oleh karenanya terhadap pelaku tindak penyiksaan harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan mempertimbangkan sifat kejahatan Indonesia menunjukkan kesungguhannya dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM, khususnya hak bebas dari penyiksaan dengan mengesahkan Konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 yang sesuai dengan nilai Pancasila pada Sila kedua¹², Pasal 28G ayat (2)¹³, dan Pasal 28I¹⁴ Undang-Undang Dasar 1945 sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia serta sumber dan landasan hukum nasional yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kemudian pada tahun 1999, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, meskipun tidak secara keseluruhan mengatur mengenai pencegahan dan larangan tindak penyiksaan, namun dalam salah satu Pasalnya diatur mengenai hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.¹⁵

Di Indonesia, praktik penyiksaan juga terjadi kepada para terduga tindak pidana terorisme. Dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, aparat penegak hukum tidak jarang melakukan tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga melakukan aksi terorisme di Indonesia. Tindakan represif tersebut termasuk didalamnya tindak penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lainnya yang kejam

¹² Bunyi dari Sila kedua: “Kemanusiaan yang adil dan Beradab.”

¹³ Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan memperoleh suaka politik dari negara lain.”

¹⁴ Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui, sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

¹⁵ Lihat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

dan tidak manusiawi. Pada kasus kematian Siyono yang terjadi pada Maret 2016, seorang warga Dusun Brengkungan, Desa Pogung, Cawas, Klaten. Siyono ditangkap oleh Densus 88 karena ia diduga terlibat dalam aksi terorisme. Kematian warga Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, ini pun diduga kuat terjadi lantaran adanya penyiksaan yang dilakukan Detasemen Khusus Antiteror 88 (Densus 88) Polri.¹⁶ Kasus penangkapan oleh Densus 88 yang berujung pada kematian juga terjadi kepada Muhammad Jefri yang diduga turut terlibat dalam kegiatan kelompok teroris di Indonesia. Muhammad Jefri dibekuk Detasemen Khusus 88 Antiteror di Jalan Jendral Sudirman, Cipancuh, Haurgelis, Indramayu pada Rabu, 7 Februari 2018.¹⁷ Kemudian, di hari yang sama pada pukul 18.30 WIB, Jefri dikabarkan telah meninggal dunia. Peristiwa ini tentunya sangat disayangkan terlebih adanya keterlibatan penegak hukum yaitu Detasemen Khusus sebagai satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kasus ini. Kasus ini merupakan contoh dari sekian banyak kasus tindak penyiksaan lainnya yang terjadi di Indonesia dengan keterlibatan aparaturnegara didalamnya.

Selama ini pemeriksaan kasus penyiksaan pada umumnya menggunakan pasal-pasal penganiayaan dalam KUHP, akan tetapi permasalahannya pengaturan penganiayaan dalam KUHP tidak cukup mampu menghadapi kompleksitas suatu tindakan penyiksaan, baik dari sisi tingkat kejahatan (*gravity of the offence*)

¹⁶ Damanhuri Zuhri, "Kasus Siyono Pintu Masuk Perbaikan Penanganan Terorisme", diakses pada <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/04/07/o59i0e301-kasus-siyono-pintu-masuk-perbaikan-penanganan-terorisme>, tanggal 18 Februari 2018 pukul 20.38 WIB.

¹⁷ Elba Damhuri, "Menguak Misteri Kematian Jefri, Terduga Teroris Asal Lampung", diakses pada <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/02/16/p47ili440-menguak-misteri-kematian-jefri-terduga-teroris-asal-lampung>, tanggal 2 Maret 2018 pukul 12.26 WIB.

penyiksaan maupun kemampuan untuk menjangkau aktor-aktor yang terlibat dan harus dihukum.¹⁸ Penggunaan pasal penganiayaan dalam KUHP untuk menghukum pelaku-pelaku penyiksaan menjadikan tingkat kejahatan yang dilakukan seharusnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, turun menjadi penganiayaan biasa dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Akibatnya, banyak kasus penyiksaan yang kemudian diperlakukan sebagai kejahatan biasa dan hanya menjangkau para pelaku langsung dengan hukuman yang relatif ringan, serta berpotensi untuk mengulangi perbuatannya.¹⁹

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mewajibkan semua tindakan negara dan pemerintah senantiasa didasarkan pada asas-asas dan aturan hukum tertentu baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam kasus terorisme, tersangka atau terdakwa tetap mendapat jaminan pemberlakuan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sampai mereka diputus pengadilan sebagai terpidana dengan kekuatan hukum yang pasti. Sebagaimana termuat dalam Pasal 27 ayat (1) tentang Asas Persamaan Kedudukan di depan Hukum yang mana harus diimplementasikan dalam proses peradilan pidana sebagai Asas Praduga Tidak Bersalah yang diatur dalam Pasal 8 UU No. 14 tahun 1970 jo Pasal 8 UU No. 35 tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni bahwa: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut di persidangan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dinyatakan dalam putusan Hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.”

¹⁸ Zainal Abidin, 2017 *Tindak Pidana Penyiksaan dalam RKUHP*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, hlm. 3.

¹⁹ *Ibid.*

Meskipun secara normatif, perlindungan dari adanya tindak penyiksaan terhadap tersangka atau terdakwa diatur dalam hukum internasional dan aturan-aturan hukum di Indonesia, namun dalam beberapa kasus tindak pidana terorisme di Indonesia, aturan-aturan hukum tersebut sering dilanggar oleh aparat penegak hukum, salah satu contohnya dalam kasus Siyono dan Muhammad Jefri yang merupakan terduga tindak pidana terorisme. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“Implementasi *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* Tahun 1984 dalam Kasus Terorisme di Indonesia”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* dalam kasus terorisme di Indonesia?
2. Apa saja upaya yang dilakukan Pemerintah RI untuk mencegah terulangnya pelanggaran terhadap *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* dalam kasus terorisme di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* dalam kasus terorisme di Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah RI untuk mencegah terulangnya pelanggaran terhadap *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* dalam kasus terorisme di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, menambah cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk memberikan pemahaman yang lebih luas, memberikan informasi dan pengetahuan serta dapat dijadikan bahan referensi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum internasional dan hukum nasional terkait larangan segala bentuk tindak penyiksaan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pengaturan hukum terhadap penanggulangan tindak penyiksaan yang diatur dalam *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* beserta penerapannya.

- b. Diharapkan agar hasil penelitian ini menjadi pertimbangan dan dapat digunakan bagi semua pihak termasuk aparat penegak hukum dan kalangan akademisi serta masyarakat umum khususnya yang memiliki perhatian serius dalam hukum internasional.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari).²⁰ Dalam bukunya “Metodologi Penelitian Hukum” Bambang Sunggono mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian merupakan “suatu upaya pencarian” pengetahuan yang benar. Metode Penelitian Hukum dapat diartikan sebagai cara dalam melakukan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis terhadap gejala hukum yang bersangkutan. Untuk dapat memperoleh data yang maksimum dan relevan dalam penulisan ini, sehingga dapat mencapai sasaran sesuai dengan judul yang ditetapkan, maka metode penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara real dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lain dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif atau hukum yang dikonsepsikan sebagai produk tertulis dalam

²⁰ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 27.

peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang dijadikan patokan berperilaku bagi manusia.²¹

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan-permasalahan yang penulis angkat berdasarkan data yang diperoleh.

2. Sumber Data

Di dalam melakukan penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari objek penelitian lapangan (*field research*) yaitu Kantor Pusat Muhammadiyah dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Jakarta.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah diolah dan merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum yang terkait dengan masalah penelitian, antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²² Data sekunder tersebut berbentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketetapan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan yang terdiri dari:

²¹ Amirudin dan H. Zainal, 2003, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 118.

²² *Ibid*, hlm. 30-31.

- a) *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* Tahun 1984;
- b) *Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* Tahun 2002;
- c) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948;
- d) Kovenan Internasional tentang Hak- hak Sipil dan Politik Tahun 1966;
- e) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia);
- g) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan pada dasarnya memberikan penjelasan secara teoritis terhadap rumusan-rumusan peraturan yang dijadikan dasar hukumnya dan atau menjelaskan secara teoritis bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli yang terdapat dalam literatur yang digunakan serta dokumen yang diperlukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat dilapangan baik berupa berkas maupun dokmen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian.

b) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalau kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur dimana selain menanyakan pertanyaan yang telah disusun, juga menanyakan pertanyaan lain yang merupakan pengembangan pertanyaan sebelumnya.

c) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

²³ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press., hlm. 52

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh setelah penelitian diolah melalui proses editing yakni pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang didapat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisa Data

Data yang telah diolah sebelumnya dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Dalam hal ini akan dianalisis secara kualitatif yaitu didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, teori ahli termasuk pengetahuan yang didapatkan kemudian diuraikan dengan kalimat-kalimat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah.dalam hal ini adalah penulisan proposal. Adapun sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca dengan mudah memahami proposal ini. Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari empat bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan membahas secara umum mengenai istilah dan praktik penyiksaan yang terjadi di Indonesia, latar belakang dan tujuan pembentukan konvensi, ruang lingkup dalam konvensi, definisi terorisme serta pengaturan terorisme dalam hukum nasional.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian penulis, yang membahas mengenai implementasi *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment* tahun 1984 dalam kasus terorisme di Indonesia dan upaya yang dilakukan Pemerintah RI untuk mencegah terulangnya pelanggaran terhadap *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment* tahun 1984 dalam kasus terorisme di Indonesia.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.